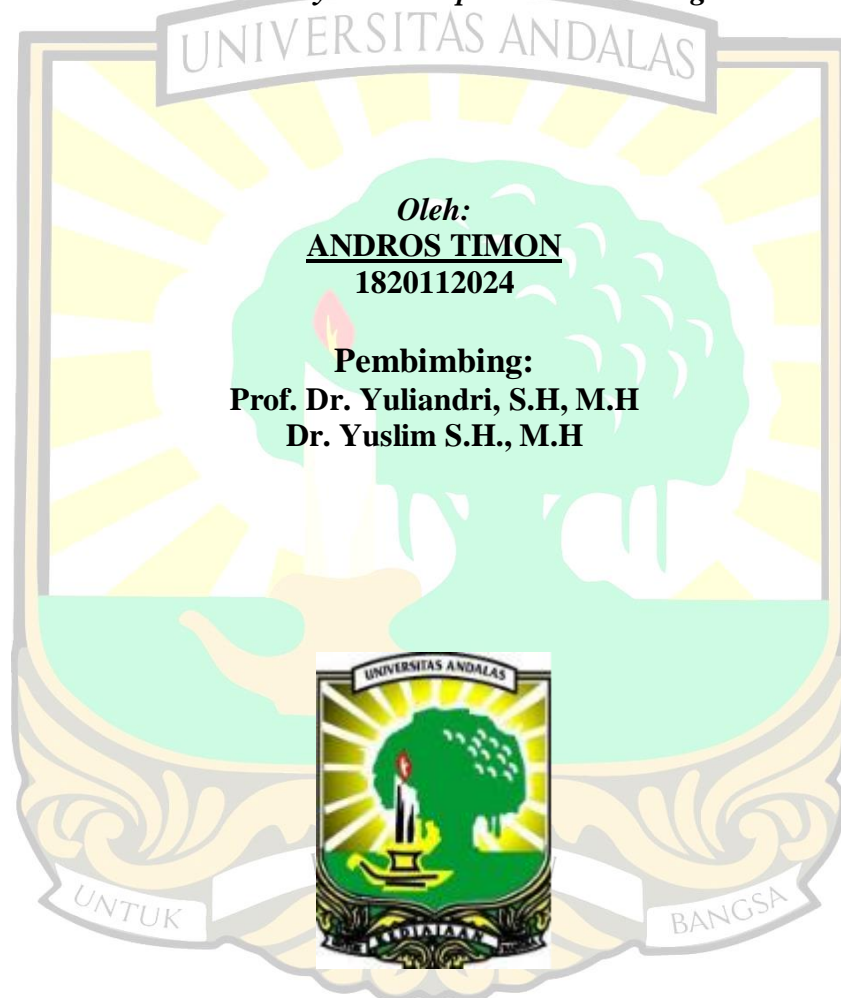


TESIS

PELAKSANAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 - 2020

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:
ANDROS TIMON
1820112024

Pembimbing:
Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H
Dr. Yuslim S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018-2020**

**Andros Timon, 1820112024, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 139 halaman, Tahun 2020**

ABSTRAK

Pembentukan peraturan daerah tidak didasarkan dengan asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat serta bersifat kekinian (*up to date*). Data dan informasi pendukung untuk kepentingan penyusunan rancangan peraturan daerah dapat disusun dalam bentuk "Naskah Akademik". Keberadaan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan, kebijakan dan/atau aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah, dengan harapan dari peraturan daerah tersebut dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju. Penyusunan naskah akademik di Kota Bukittinggi dilakukan setelah penetapan program pembentukan peraturan daerah dan setelah penyusunan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, penyusunan rancangan peraturan daerah di Kota Bukittinggi belum dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap substansi rancangan peraturan daerah yang diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah, sehingga menemui hambatan/kendala dalam proses penyusunan dan/atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu: bagaimana mekanisme penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi, dan apa kendala penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi tidak dilakukan tahapan penyelarasan naskah akademik, sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan setelah tahapan perencanaan pembentukan peraturan daerah hanya sebagai formalitas dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada SKPD yang tidak memahami metode penyusunan naskah akademik serta prosedur dan tahapan pembentukan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan, mengakibatkan penganggaran anggaran untuk penyusunan naskah akademik baru dianggarkan setelah penetapan program pembentukan peraturan daerah, padahal proses pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan yang didahului dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Kata Kunci : Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Bukittinggi